

## APAKAH PEMILIHAN KEPALA DAERAH MEMENGARUHI POLA MIGRASI KELUAR? BUKTI EMPIRIS DI INDONESIA

(Does Local Election Influence Outmigration Pattern? Evidence from Indonesia)

Diana Sartika\* dan Vid Adrison\*\*

\*Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Langkat  
Jl. K. H. Zainul Arifin No. 1, Langkat, Sumatera Utara, 20811  
Email: dianas220113@gmail.com

\*\*Departemen Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia  
Jl. Salemba Raya No. 4, Jakarta Pusat, 10430  
Email: vadrison@gmail.com

Naskah diterima: 30 September 2020

Naskah direvisi: 12 November 2020

Naskah diterbitkan: 30 Juni 2021

### Abstract

Differences in migration flow between regions suggest a gap in development, such as amenities and public goods provision. Indonesia has decentralized to reduce this gap, including through direct election at the regional level (*pilkada*). The elected leader can provide public goods and services according to people's needs and preferences. A change in policy direction related to amenities and the provision of public goods from local government will occur at the election time. This influences different migration patterns. This study specifies and estimates a panel model for inter-municipal outmigration in Indonesia during the elections period using Indonesia's 514 municipal migration data between 2014 and 2018 from the Ministry of Home Affairs; we show that throughout the observed year our regression analysis demonstrates that there are a strong lead effect and lag effect of local election on the size of outmigration flows. Our findings thus suggest that local election can reduce outmigration flow in a district that went through election by 0.01 percent, due to public anticipation on the new policy direction of the prospective regional head and people tend to wait and see. Other findings suggest that there is a strong lag effect, by 0.02 percent. These results indicate that new policy direction may provide incentives to stay or delay the timing of migration for potential migrant, thus reduce the migration outflow, at least in the short run.

Keywords: migration, local election, Indonesia

### Abstrak

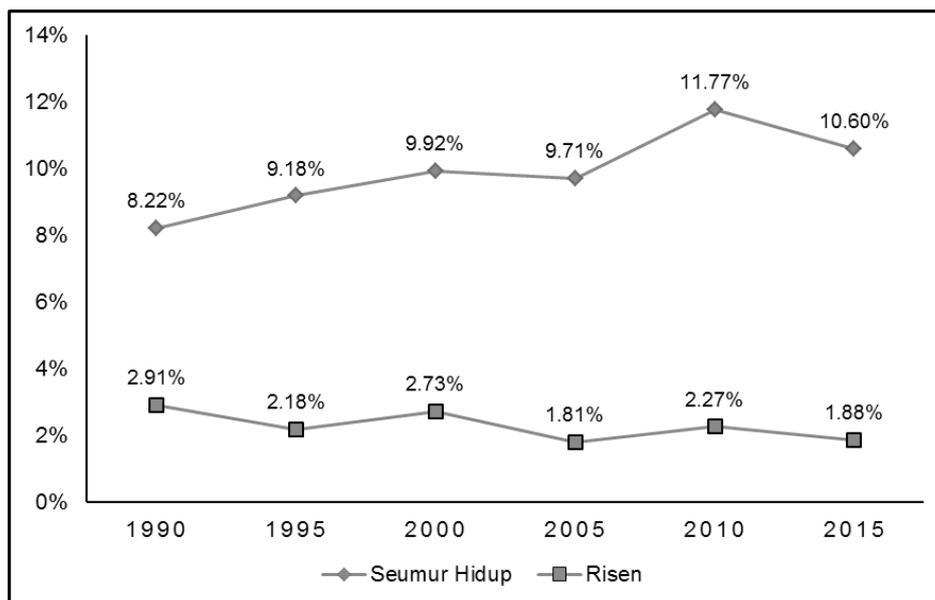
Perbedaan pola migrasi antardaerah menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan, salah satunya dari sisi fasilitas serta penyediaan barang dan layanan dasar. Desentralisasi merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah, di antaranya melalui desentralisasi politik yaitu pemilihan langsung kepala daerah (*pilkada*). Kepala daerah terpilih diharapkan dapat menghasilkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakatnya. Oleh karena itu, akan ada perubahan arah kebijakan terkait fasilitas dan penyediaan layanan dasar dari pemerintah daerah. Hal ini akan menyebabkan pola migrasi yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk melihat pola migrasi keluar antardaerah pada saat pelaksanaan *pilkada* di Indonesia menggunakan data migrasi per semester tahun 2014-2018 dari Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri pada 514 kabupaten/kota. Sepanjang tahun pengamatan, hasil regresi menunjukkan bahwa ada efek antisipasi dan efek *lag* yang kuat dari *pilkada* pada arus migrasi keluar. Hasil estimasi menggunakan model *panel fixed effect* menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan *pilkada* dapat menurunkan arus migrasi keluar pada daerah yang melaksanakan *pilkada* sebesar 0,01 persen, karena adanya efek antisipasi masyarakat terhadap arah kebijakan baru dari calon kepala daerah dan masyarakat cenderung untuk melakukan *wait and see*. Hasil estimasi juga menunjukkan bahwa terdapat efek *lag* yang kuat sebesar 0,02 persen. Hasil ini mengindikasikan bahwa arah kebijakan baru di daerah dapat menjadi insentif untuk menetap atau menunda waktu bermigrasi bagi potensial migran, sehingga menurunkan arus migrasi keluar, setidaknya pada *short run*.

Kata kunci: migrasi, *pilkada*, Indonesia

### PENDAHULUAN

Perbedaan pola migrasi antardaerah merefleksikan adanya perbedaan daya tarik seperti pertumbuhan ekonomi dan fasilitas pembangunan (Hao et al., 2016; Lee, 1966). Daerah yang memiliki kesejahteraan wilayah dan kesempatan kerja lebih baik (Liu & Shen, 2014; Ranis & Fei, 1961; Todaro, 1976), merupakan pusat aktivitas ekonomi (Mitze & Schmidt, 2015; van Lottum & Marks, 2012), dan memiliki infrastruktur serta *amenities* lebih baik (Lee, 1966; Wajdi et al., 2015) menjadi tempat tujuan migrasi.

Perkembangan ekonomi di suatu daerah akan menarik migran, di sisi lain migran yang masuk juga dapat memengaruhi perkembangan ekonomi daerah tujuan migrasi. Namun, situasi ini berpotensi menimbulkan beberapa masalah seperti kesenjangan sumber daya manusia (SDM), yang menjadi salah satu masalah pembangunan regional yaitu *brain drain* (Liu & Shen, 2014; Stark et al., 1997). Di mana di daerah yang kurang berkembang, SDM yang berkualitas tinggi dalam kelompok usia produktif memiliki kecenderungan untuk bermigrasi.



Sumber: BPS, 2019 (diolah).

**Gambar 1.** Persentase Penduduk yang Melakukan Migrasi di Indonesia Selama Periode Tahun 1990-2015

Salah satu penyebabnya adalah rendahnya tingkat kehidupan di daerah asal dan pada saat yang sama karena adanya harapan untuk mendapat kesejahteraan yang lebih baik karena tingkat upah yang lebih tinggi, kualitas hidup dan layanan dasar yang lebih baik di daerah lain, sehingga mendorong orang untuk bermigrasi (Wajdi et al., 2017). Oleh karena itu, akan ada perbedaan pola migrasi di mana daerah yang memiliki pencapaian pembangunan yang lebih baik akan cenderung memiliki angka migrasi masuk lebih tinggi, sedangkan daerah yang tidak memiliki karakteristik tersebut akan memiliki angka migrasi keluar lebih tinggi.

Indonesia mempunyai sejarah panjang migrasi, bukti empiris menunjukkan setidaknya sejak jaman kolonial banyak penduduk di Indonesia yang melakukan migrasi antardaerah maupun migrasi ke negara lain (Hugo, 1982). Disparitas pembangunan merupakan salah satu faktor pendorong tingginya angka migrasi antardaerah di Indonesia. Pemusatan investasi publik dan swasta di Jawa pada pre-reformasi menjadi alasan ketidakmerataan pembangunan di Indonesia terutama antara Pulau Jawa dan non-Jawa (Alatas, 1993).

Setelah adanya desentralisasi, pola migrasi internal di Indonesia menunjukkan pola yang berbeda sebagai respons terhadap perubahan kondisi ekonomi dan pembangunan daerah, terlihat arus migrasi yang tinggi dari Jawa ke Sumatera dan arus migrasi ke wilayah lain di luar Pulau Jawa (Lottum & Marks, 2012). Hal ini salah satunya disebabkan populasi penduduk yang terlalu padat di Jawa serta kesenjangan kesempatan kerja antara Jawa dan daerah lainnya. Namun, Jawa khususnya

*urban primate*<sup>1</sup> Jakarta masih menjadi daerah tujuan migrasi karena memiliki hasil pembangunan yang lebih baik.

Gambar 1 menunjukkan tren penduduk yang melakukan migrasi tahun 1990-2015. Berdasarkan data Sensus Penduduk tahun 2010, 11,7 persen dari total penduduk Indonesia melakukan migrasi (BPS, 2011). Hal ini menunjukkan bahwa banyak penduduk Indonesia yang berpindah dari tempat asalnya. Sensus Penduduk 2010 juga menunjukkan sebanyak 58 persen penduduk berpindah menuju Pulau Jawa dari total penduduk yang melakukan migrasi. Selain itu, terlihat penurunan persentase penduduk yang bermigrasi menjadi 10,6 persen pada tahun 2015. Hal ini mengindikasikan adanya perubahan pola migrasi penduduk Indonesia.

Dalam perspektif makroekonomi, perbedaan pola migrasi disebabkan adanya disparitas pembangunan, seperti perbedaan upah dan kesempatan kerja di masing-masing daerah (Lewis, 1954; Ranis & Fei, 1961). Oleh karena itu, daerah yang memiliki kesempatan kerja yang lebih baik dan tingkat upah lebih besar akan menjadi daerah tujuan migran. Migrasi didasarkan pada ekspektasi mendapatkan kesejahteraan yang lebih baik, sehingga daerah yang lebih maju menjadi tempat tujuan bermigrasi (Harris & Todaro, 1970; Todaro, 1969). Migrasi juga dianggap dapat menjadi jawaban untuk meningkatkan status sosial ekonomi, sehingga migrasi cenderung menuju daerah yang lebih maju (Stark, 1984; Waldorf & Yun, 2016).

<sup>1</sup> *Urban primate* adalah pusat politik, ekonomi, dan budaya yang dominan di suatu negara, dikelilingi oleh kota-kota besar dan menengah lainnya yang berfungsi sebagai pusat kegiatan ekonomi regional.

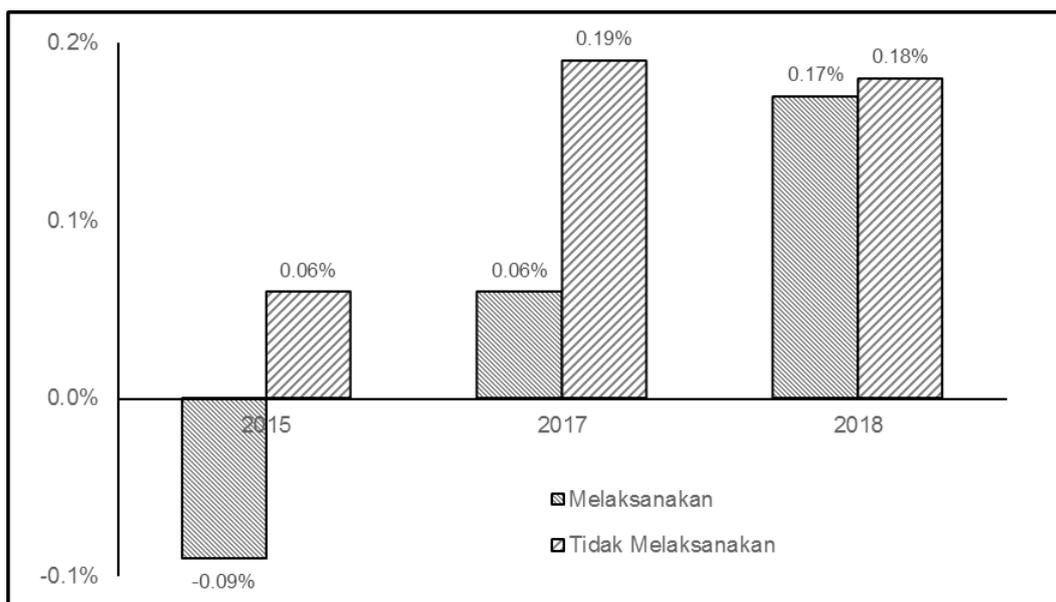
Selain faktor tersebut, terdapat faktor lain yang dapat memengaruhi pola migrasi yaitu penyediaan barang publik atau layanan dasar di daerah. Tiebout (1956) menyatakan bahwa masyarakat akan memilih tinggal di daerah yang memiliki kebijakan pemerintah yang sesuai dengan preferensinya. Perbedaan ini dapat berupa *amenities* dan penyediaan layanan dasar. Daerah dengan belanja pemerintah yang lebih tinggi dan penyediaan layanan dasar yang memadai akan lebih padat penduduknya daripada daerah lain. Penyediaan layanan dasar dan *amenities* yang lebih baik mendorong meningkatnya migrasi masuk ke daerah tersebut. Oleh karena itu, pada negara yang menerapkan sistem pemerintah sampai pada level lokal (desentralisasi), akan ada pola migrasi yang berbeda karena masing-masing daerah otonom memiliki kemampuan yang berbeda dalam memanfaatkan sumber daya yang dimiliki dan kemampuan fiskal yang berbeda sehingga terdapat daya tarik tersendiri yang akan memengaruhi pola dan besaran arus migrasi di masing-masing daerah otonom.

Dalam kasus Indonesia, selain desentralisasi fiskal juga mengimplementasikan desentralisasi politik berupa pemilihan kepala daerah (pilkada). Hal ini karena masing-masing daerah memiliki kebutuhan yang berbeda sehingga kepala daerah yang terpilih diharapkan dapat menghasilkan kebijakan yang lebih baik dan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakatnya (Faguet, 2014). Di Indonesia, kepala daerah memiliki kewenangan untuk mengubah arah kebijakan pembangunan yang mungkin dapat menjadi insentif orang untuk menetap di daerah tersebut. Hal ini dapat merubah pola migrasi.

Pola ini mulai terlihat dari arus migrasi pada daerah yang melaksanakan pilkada dan daerah yang tidak melaksanakan. Berdasarkan data Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kemendagri, rata-rata *net* migrasi di daerah yang melaksanakan pilkada lebih tinggi daripada daerah yang tidak melaksanakan pada tahun tersebut (Gambar 2). Hal ini konsisten terlihat pada periode pilkada tahun 2015, 2017, dan 2018. Angka ini mengindikasikan adanya pola migrasi yang berbeda ketika suatu daerah melaksanakan pilkada. Namun, belum dapat diketahui implikasi dari hubungan antara waktu pelaksanaan pilkada dan pola migrasi.

Di Indonesia, beberapa penelitian terkait migrasi sudah banyak diteliti. Salah satunya penelitian Lottum & Marks (2012), menemukan bahwa migrasi di Indonesia menuju daerah yang memiliki hasil pembangunan lebih baik terutama *urban primate* Jakarta yang memiliki skala ekonomi yang jauh lebih besar dari daerah lainnya. Motivasi mendapatkan ekonomi yang lebih baik menjadi salah satu pendorong utama orang bermigrasi karena adanya disparitas yang lebar antardaerah.

Berbeda dengan penelitian di atas, penelitian Prima & Khoirunurrofik (2019) menunjukkan bahwa masyarakat akan tetap bermigrasi meskipun terdapat peningkatan penyediaan *amenities* dan barang publik di daerah mereka. Walaupun peningkatan belanja pemerintah menjadi faktor pendorong untuk tetap tinggal di daerah asalnya, masyarakat hanya merespons pada pembangunan fisik daerah. Mereka akan cenderung untuk tidak bermigrasi selama melihat prospek peningkatan kesejahteraan mereka di masa depan. Penelitian ini juga mengindikasikan



Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, 2019 (diolah).

**Gambar 2.** Rata-rata Persentase *Net* Migrasi Tahunan Daerah yang Melaksanakan Pilkada dan Tidak Melaksanakan pada Periode Tahun 2015, 2017, dan 2018

semakin besar peran pemerintah daerah dalam mengembangkan barang publik daerahnya dapat memengaruhi perilaku masyarakatnya dalam menilai manfaat dan biaya migrasi.

Penelitian Wajdi et al. (2015) menemukan bahwa pola migrasi inter-regional di Indonesia lebih didorong oleh ekspektasi dari insentif yang akan didapat di daerah tujuan daripada faktor pendorong di daerah asal. Konsisten dengan penelitian sebelumnya, Wajdi et al. (2017) menemukan bahwa daerah yang memiliki lingkungan, layanan dasar, dan kesempatan kerja lebih baik akan menjadi daerah tujuan migrasi.

Selain faktor ekonomi, terdapat faktor non-ekonomi lain yang mungkin memengaruhi pola migrasi. Penelitian di negara lain menunjukkan bahwa faktor politik seperti waktu pelaksanaan pilkada dapat menyebabkan perubahan pola migrasi karena adanya perubahan pada arah kebijakan pemerintah terkait layanan dasar yang diberikan. Kondisi ini memunculkan efek antisipasi masyarakat sehingga mendorong mereka untuk *wait and see* terhadap perubahan arah kebijakan yang akan datang (Revelli, 2019; Tullock, 1971). Hal ini dapat menjadi faktor penahan migrasi keluar, setidaknya hingga pelaksanaan pilkada berakhir.

Penelitian Otto & Steinhardt (2014) menemukan bahwa adanya perbedaan kebijakan terkait pemanfaatan barang publik dan *amenities* berkontribusi membentuk opini publik, terutama pada migran dalam mengambil keputusan untuk pindah atau menetap. Jika migran melihat bahwa kebijakan tersebut dapat menguntungkan mereka maka mereka akan memilih untuk menetap.

Sejalan dengan penelitian sebelumnya, penelitian Revelli (2019) menemukan bahwa pada negara yang memberlakukan pilkada sampai ke level lokal memungkinkan adanya perubahan pola migrasi. Hal ini karena pelaksanaan pilkada dapat merubah ekspektasi individu yang tinggal di daerah tersebut karena adanya kemungkinan perubahan arah kebijakan oleh kepala daerah yang baru terkait *amenities* dan penyediaan layanan dasar. Sejalan dengan penelitian tersebut, penelitian Otto & Steinhardt (2014) menemukan bahwa adanya perbedaan kebijakan terkait pemanfaatan barang publik dan *amenities* berkontribusi membentuk opini publik, terutama pada migran dalam mengambil keputusan untuk pindah atau menetap. Jika migran melihat bahwa kebijakan tersebut dapat menguntungkan mereka maka mereka akan memilih untuk menetap.

Penelitian tentang hubungan antara pilkada dan migrasi belum banyak dilakukan di Indonesia. Penelitian Tiwari (2017) tentang hubungan antara

pembangunan daerah yang direpresentasikan melalui variabel waktu pelaksanaan pilkada dan keputusan migrasi pada level rumah tangga menemukan bahwa ada pola migrasi yang berbeda sebelum dan setelah adanya pemilihan langsung kepala daerah. Rumah tangga yang berada di daerah yang melaksanakan pilkada cenderung tidak menjadi rumah tangga pengirim migran. Selama periode pilkada rumah tangga akan cenderung untuk menetap. Hal ini mungkin terjadi karena ada insentif tertentu yang individu dapatkan saat pelaksanaan pilkada. Namun pada penelitian tersebut belum dijelaskan implikasi dari hasil ini.

Berdasarkan kajian literatur, penelitian yang ada belum membahas tentang adanya perubahan pola migrasi pada saat pelaksanaan pilkada khususnya di negara demokrasi muda seperti Indonesia. Pada penelitian terdahulu terkait migrasi (Prima & Khoirunurrofik, 2019; Tiwari, 2017; Wajdi et al., 2015; Wajdi et al., 2017), belum ditemukan adanya penelitian yang menghubungkan desentralisasi khususnya waktu pelaksanaan pilkada sebagai salah satu faktor yang mungkin memengaruhi perubahan pola migrasi di Indonesia. Selain itu, belum ditemukan adanya penelitian yang menganalisis migrasi secara agregat pada level kabupaten/kota dengan menggunakan data migrasi per semester.

Dengan mempertimbangkan angka positif *net* migrasi pada saat daerah melaksanakan pilkada (Gambar 2), mengindikasikan adanya daya tarik yang lebih besar, sehingga terdapat kemungkinan angka *net* migrasi positif terjadi karena arus penduduk masuk lebih besar daripada penduduk keluar. Adanya kemungkinan perubahan arah kebijakan oleh kepala daerah yang baru terkait penyediaan layanan dasar dapat merubah ekspektasi individu yang tinggal di daerah yang melaksanakan pilkada, saat sebelum pelaksanaan sampai dengan waktu pilkada tersebut dilaksanakan (Revelli, 2019). Dengan asumsi bahwa individu yang tinggal di daerah yang melaksanakan pilkada memiliki informasi yang lebih baik terkait perubahan arah kebijakan (Tiwari, 2017), maka penelitian ini berfokus pada pola migrasi keluar. Oleh karena itu, penelitian ini berusaha menganalisis tentang korelasi antara waktu pelaksanaan pilkada dan pola migrasi keluar per semester seluruh kabupaten/kota di Indonesia pada 3 periode pilkada pada tahun 2014-2018.

Penelitian ini terbatas pada mobilitas penduduk pada level agregat kabupaten/kota yang direpresentasikan dengan arus migrasi keluar, tipe migrasi pada penelitian ini merupakan migrasi permanen. Karena keterbatasan data yang ada, penelitian ini hanya mencakup faktor penarik dan pendorong migrasi level agregat dan belum

dapat menjawab motivasi perpindahan penduduk di level individu maupun faktor lain yang dapat memengaruhi ekspektasi potensial migran seperti adanya inkumben atau usaha-usaha yang dilakukan calon kepala daerah selama periode menjelang pemilihan.

## METODE

Penelitian ini berusaha melihat hubungan pelaksanaan pilkada dengan pola migrasi keluar di Indonesia. Penelitian ini memanfaatkan ketersediaan data migrasi per semester tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia sebanyak 514 kabupaten/kota pada tahun 2014-2018. Periode pilkada yang digunakan adalah 9 Desember 2015, 15 Februari 2017, dan 27 Juni 2018. Penelitian ini menganalisis data panel yang menggabungkan data migrasi Dukcapil Kemendagri dan data indikator sosial ekonomi BPS. Data migrasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah data agregat migrasi per semester<sup>2</sup>, dibentuk dari data *de jure* pelaporan perpindahan penduduk pada level kabupaten/kota.

Mengacu pada model Tiebout (1956), penelitian ini mengasumsikan bahwa migrasi keluar pada daerah yang melaksanakan pilkada akan memiliki nilai lebih kecil daripada daerah yang tidak melaksanakan. Untuk melihat perubahan migrasi keluar pada saat pilkada diestimasi dengan menggunakan metode *Panel Fixed Effect*. Dengan mempertimbangkan perbedaan karakteristik antarpulau dan antarwaktu yang tidak dapat diobservasi di dalam model, model ini memasukkan *time trend*,  $q_t$  dan *semester fixed effects*,  $u_m$ .

Berikut persamaan model dasar tersebut:

$$\begin{aligned} outmigration_{it} = & \beta_0 + \beta_1 Localelection_{it} + \\ & \beta_2 PDRBcap_{it} + \\ & \beta_3 RelativeGrowth_{it} + \\ & \beta_4 Shareagriculture_{it} + \\ & \beta_5 Sharemanufacturing_{it} + \\ & \beta_6 Density_{it} + \beta_7 HLS_{it} + \beta_8 UHH_{it} + \\ & u_m + q_t + v_{it} \dots\dots\dots (1) \end{aligned}$$

Di mana *outmigration* adalah persentase migrasi keluar per jumlah penduduk semester sebelumnya pada level kabupaten/kota; *Localelection* adalah variabel *dummy* 1 jika melaksanakan pilkada pada  $t$ ; *PDRBcap* adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita di level kabupaten/kota; *RelativeGrowth* adalah *dummy* 2 jika pertumbuhan ekonomi suatu daerah relatif lebih besar daripada

pertumbuhan ekonomi nasional; *Shareagriculture* adalah proporsi PDRB pada sektor pertanian; *Sharemanufacturing* adalah proporsi PDRB pada sektor manufaktur; *Density* adalah kepadatan penduduk; *HLS* adalah angka harapan lama sekolah di level kabupaten/kota; dan *UHH* adalah usia harapan hidup di level kabupaten/kota.

Penelitian ini menggunakan kontrol *time trend* linier karena terdapat banyak rangkaian waktu yang memiliki kecenderungan untuk meningkat antarwaktu, sehingga mengabaikan fakta bahwa dua urutan tren berada dalam arah yang sama atau berlawanan dapat membuat kesalahan penarikan kesimpulan bahwa perubahan dalam satu variabel sebenarnya disebabkan oleh perubahan pada variabel lain (Wooldridge, 2013). Selain *time trend*, penelitian ini juga menggunakan  $u_m$  yang merupakan *fixed effect* semester untuk mengontrol faktor yang konstan sepanjang waktu terhadap semester dalam setahun tetapi tidak teramati yang mungkin memiliki efek terhadap hasil estimasi.

Struktur data yang memunculkan individu secara berulang antarwaktu dapat menyebabkan adanya *error* yang berkorelasi (Wooldridge, 2013). Struktur data dalam penelitian ini memunculkan individu (kabupaten/kota) secara berulang antarwaktu sehingga *error* yang dihasilkan mungkin berkorelasi. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan kluster standar *error* pada level kabupaten/kota yang memperbolehkan adanya *error* antarwaktu dalam satu individu tetapi tidak ada *error* untuk antarindividu. Keseluruhan definisi variabel penelitian tersaji dalam Tabel 1.

Penelitian ini menggunakan migrasi keluar per semester di level kabupaten/kota sebagai variabel terikat. Migrasi keluar merepresentasikan keputusan migrasi individu pada level agregat. Sebagai variabel penjelas utama, penelitian ini menggunakan waktu pilkada sebagai variabel eksogen yang merepresentasikan desentralisasi politik.

Selain variabel penjelas utama, penelitian ini menggunakan beberapa variabel kontrol berupa karakteristik sosial, ekonomi, dan demografi wilayah. Penelitian menggunakan variabel kontrol, yaitu PDRB per kapita, *relative growth*, proporsi PDRB sektor pertanian, proporsi PDRB sektor manufaktur, kepadatan penduduk, HLS, dan UHH.

Variabel kontrol pertama, yaitu PDRB per kapita yang merepresentasikan kesejahteraan wilayah (Harris & Todaro, 1970; Todaro, 1969, 1976). Ekonomi merupakan salah satu faktor yang mendorong penduduk untuk masuk ke suatu wilayah. Semakin tinggi kesejahteraan suatu wilayah akan menarik orang untuk masuk ke daerah tersebut, karena ada ekspektasi untuk mendapatkan kesejahteraan yang

<sup>2</sup> Angka agregat migrasi dihitung dengan menjumlahkan pengajuan kepindahan status kependudukan dari awal hingga akhir semester. Semester 1 dimulai pada 1 Januari-31 Juni dan semester 2 dimulai pada 1 Juli-31 Desember tiap tahun.

Tabel 1. Definisi Variabel Penelitian

Variabel	Definisi	Sumber
<b>Penjelas Utama:</b>		
<i>Outmigration</i>	Persentase jumlah penduduk keluar per Jumlah Penduduk semester sebelumnya	Dukcapil Kemendagri
<b>Kontrol:</b>		
<i>Localelection (Pilkada)</i>	Dummy variabel pemilihan kepala daerah tahun 2015, 2017, dan 2018	KPU
<i>PDRBcap</i>	Produk Domestik Regional Bruto per kapita	BPS
<i>RelativeGrowth</i>	Dummy pertumbuhan PDRB relatif terhadap PDB Nasional	BPS
<i>Density</i>	Kepadatan Penduduk	BPS/Dukcapil Kemendagri
<i>Shareagriculture</i>	Proporsi PDRB sektor pertanian	BPS
<i>Sharemanufacturing</i>	Proporsi PDRB sektor manufaktur	BPS
<i>HLS</i>	Harapan Lama Sekolah	BPS
<i>UHH</i>	Usia Harapan Hidup	BPS

Keterangan: Pilkada DKI Jakarta diadakan pada level provinsi, sehingga diasumsikan pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota yang berada di DKI Jakarta terjadi bersamaan dengan pilkada provinsi.

lebih baik. Namun, Indonesia merupakan negara yang kaya sumber daya alam (SDA) sehingga pada daerah dengan PDRB per kapita yang tinggi dengan kontribusi terbesar pembentuk PDRB dari sektor SDA, tenaga kerja di pasar tenaga kerja yang dapat diserap tidak sebesar daerah yang kontribusinya berasal dari sektor industri atau jasa. Oleh karena itu, pada daerah dengan sektor utama SDA, tenaga kerja yang mungkin terserap adalah tenaga kerja yang memiliki kemampuan spesifik sehingga hanya beberapa jenis potensial migran yang mungkin akan berpindah masuk atau menetap ke daerah tersebut (Alam et al., 2013; Bryan & Morten, 2019; Mitze & Schmidt, 2015; Stark et al., 1997).

Variabel kontrol kedua yang digunakan adalah *RelativeGrowth*. Variabel ini merepresentasikan pertumbuhan ekonomi suatu daerah relatif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah lainnya (Fratesi & Percoco, 2014; Mitze & Schmidt, 2015). Jika suatu daerah memiliki pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari daerah lain maka insentif individu untuk menetap di daerah tersebut akan besar.

Variabel kontrol ketiga adalah kepadatan penduduk. Variabel ini merepresentasikan tekanan populasi pada sumber daya seperti lahan pertanian maupun *amenities* dan layanan dasar (Lee, 1966; Liu & Yamauchi, 2014). Oleh karena itu, tingginya kepadatan penduduk di suatu daerah dapat mendorong orang untuk keluar atau berpindah untuk mencari tempat lain yang lebih sesuai dengan preferensi mereka. Namun kepadatan penduduk yang tinggi juga merepresentasikan intensitas kegiatan ekonomi yang lebih tinggi karena adanya aglomerasi ekonomi (Fratesi & Percoco, 2014; Yudhistira et al., 2019), sehingga dapat juga menjadi faktor penahan individu untuk berpindah.

Variabel kontrol keempat adalah proporsi PDRB sektor pertanian dan variabel kontrol ke lima adalah proporsi PDRB sektor manufaktur. Variabel ini merepresentasikan ketersediaan lapangan pekerjaan pada sektor pertanian dan sektor manufaktur. Daerah yang memiliki proporsi PDRB sektor manufaktur yang dapat menarik individu untuk menetap di daerah tersebut, sedangkan daerah yang memiliki proporsi PDRB sektor pertanian yang besar akan mendorong orang untuk berpindah dari daerah tersebut karena rendahnya tingkat upah dan produktivitas (Kuznets, 1973; Liu & Yamauchi, 2014).

Variabel kontrol keenam adalah Harapan Lama Sekolah (HLS) yang merepresentasikan layanan dasar pendidikan di suatu daerah. Keberadaan layanan dasar dan fasilitas pendidikan akan menjadi faktor penarik migrasi (Basker, 2018; Harris & Todaro, 1970; Lee, 1966; Wajdi et al., 2017). Harapan Lama Sekolah merupakan salah satu indikator pembentuk Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang menggambarkan kualitas pendidikan di suatu daerah dan juga menjadi gambaran tentang keberhasilan pembangunan pendidikan (UNDP, 2019). Oleh karena itu, indikator ini dapat menggambarkan perbedaan tingkat pendidikan antardaerah dengan baik dan dapat memberikan gambaran yang lebih relevan dalam perbedaan kualitas dan kuantitas layanan dasar serta fasilitas pendidikan yang ada (Antony & Rao, 2007; Cherchye et al., 2008; Eren et al., 2014; Lee et al., 2006).

Variabel kontrol ketujuh adalah Usia Harapan Hidup (UHH) yang merepresentasikan layanan dasar kesehatan. Keberadaan layanan dasar pendidikan dan kesehatan akan menjadi faktor penarik migrasi (Lee, 1966; Wajdi et al., 2017). Sejalan dengan

HLS, variabel UHH menggambarkan kualitas dan ketersediaan layanan dasar kesehatan di suatu daerah dan juga menjadi gambaran tentang keberhasilan pembangunan pendidikan (UNDP, 2019). Oleh karena itu, indikator ini dapat menggambarkan perbedaan tingkat layanan dasar kesehatan antardaerah dengan baik dan dapat memberikan gambaran yang lebih relevan dalam perbedaan kualitas dan kuantitas layanan dasar serta fasilitas kesehatan yang ada.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Analisis Deskriptif

Arus migrasi di Indonesia bervariasi antarwilayah. Berdasarkan Gambar 3 terlihat bahwa arus migrasi terkecil terdapat di wilayah timur Indonesia, yaitu Maluku, Maluku Utara, dan Papua (Mapua). Sedangkan arus migrasi terbesar terdapat di wilayah barat Indonesia, yaitu Jawa-Bali dan Sumatera. Hal ini diduga karena wilayah Jawa-Bali dan Sumatera memiliki skala ekonomi dan infrastruktur yang lebih baik sehingga mempunyai daya tarik lebih tinggi dibanding wilayah lain di Indonesia.

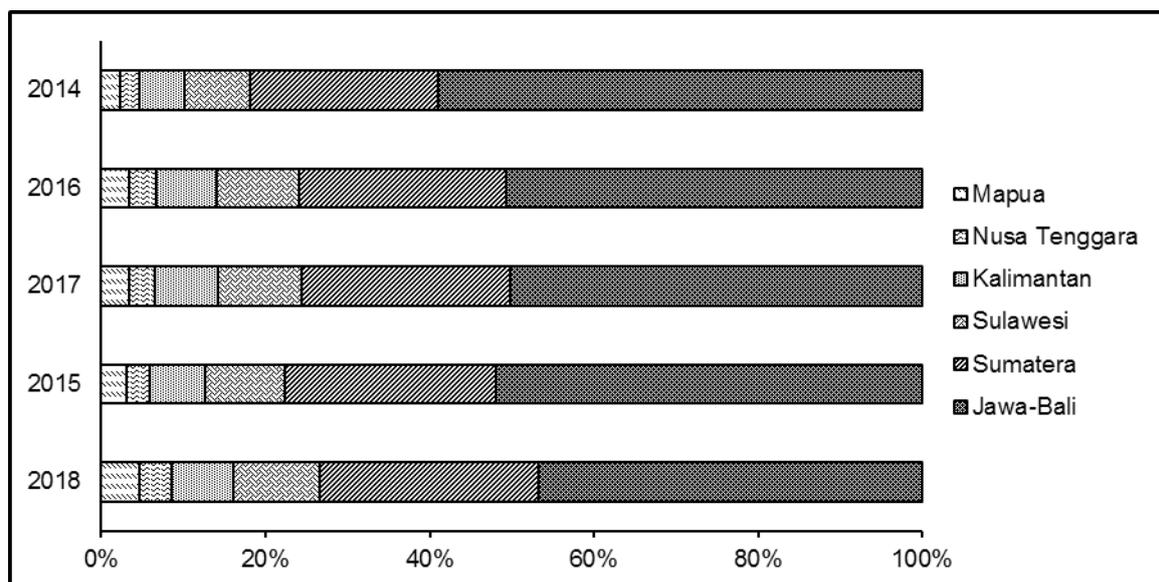
Gambar 3 juga menunjukkan bahwa ada perubahan pola migrasi di mana proporsi migrasi menuju wilayah Jawa-Bali pada tahun 2018 menurun sebanyak 12,27 persen jika dibandingkan dengan tahun 2014, sedangkan wilayah lain meningkat. Perbedaan tren ini kemungkinan karena migrasi penduduk terutama untuk jangka panjang (permanen) memiliki motif yang lebih beragam sehingga dalam menentukan daerah tujuan banyak faktor lain selain faktor ekonomi. Daya tarik suatu wilayah seperti kesejahteraan, aktivitas ekonomi yang tinggi, dan *amenities*, menjadi pertimbangan dalam menentukan lokasi tujuan migrasi (Lee, 1966;

Lottum & Marks, 2012; Wajdi et al., 2015; Wajdi et al., 2017). Selain itu, penurunan arus migrasi ini diduga karena munculnya pusat-pusat perekonomian baru di luar wilayah Jawa-Bali.

Pada negara seperti Indonesia di mana secara historis arus migrasi internal sangat tinggi serta didorong adanya disparitas peluang ekonomi dan *amenities*, menurunnya arus migrasi ke wilayah Jawa-Bali mengindikasikan perbaikan kondisi ekonomi. Ketika kondisi ekonomi membaik akan menurunkan insentif untuk bermigrasi (Tiwari, 2017). Selain itu, besarnya biaya migrasi ke Jawa-Bali karena jarak yang jauh menyebabkan individu memilih berpindah ke daerah yang jaraknya lebih dekat dan kondisi ekonomi yang lebih baik dari daerah asalnya (Wajdi et al., 2017).

Sebagai salah satu negara demokrasi muda, sejak tahun 2001 Indonesia telah melaksanakan desentralisasi. Pemerintah pusat mengalihkan beberapa fungsi administratif dan fiskal serta kekuasaan politik kepada pemerintah daerah hingga level kabupaten/kota pada tahun 2004. Adapun sistem pemilihan kepala daerah pada level kabupaten/kota di Indonesia diadakan setiap lima tahun di mana kepala daerah dipilih langsung oleh masyarakat. Namun pada awal implementasinya, hanya sepertiga dari seluruh kabupaten/kota di Indonesia dapat mengikuti pemilihan kepala daerah secara langsung pada Juni 2005 karena adanya perbedaan masa akhir jabatan kepala daerah.

Implikasi dari pemilihan ini menyebabkan adanya waktu pemilihan kepala daerah yang berbeda-beda antarkabupaten/kota. Walaupun masa jabatan kepala daerah sama untuk seluruh daerah (5 tahun), tahun awal dan akhir masa jabatan dapat berbeda



Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil, 2018 (diolah).

**Gambar 3.** Persentase Jumlah Migran Menurut Pulau Tujuan Tahun 2014-2018

antarkabupaten/kota. Oleh karena itu, dengan adanya waktu pilkada yang berbeda, kinerja setiap kabupaten/kota dapat diisolasi dari guncangan waktu tertentu (Karimah & Yudhistira, 2020; Revelli, 2019; Sjahrir et al., 2013). Hal ini mengindikasikan kinerja setiap kabupaten/kota kurang dipengaruhi oleh daerah lain sehingga memungkinkan penilaian kinerja yang relatif lebih akurat dalam menangkap pencapaian masing-masing kabupaten/kota (Revelli, 2019; Sjahrir et al., 2013).

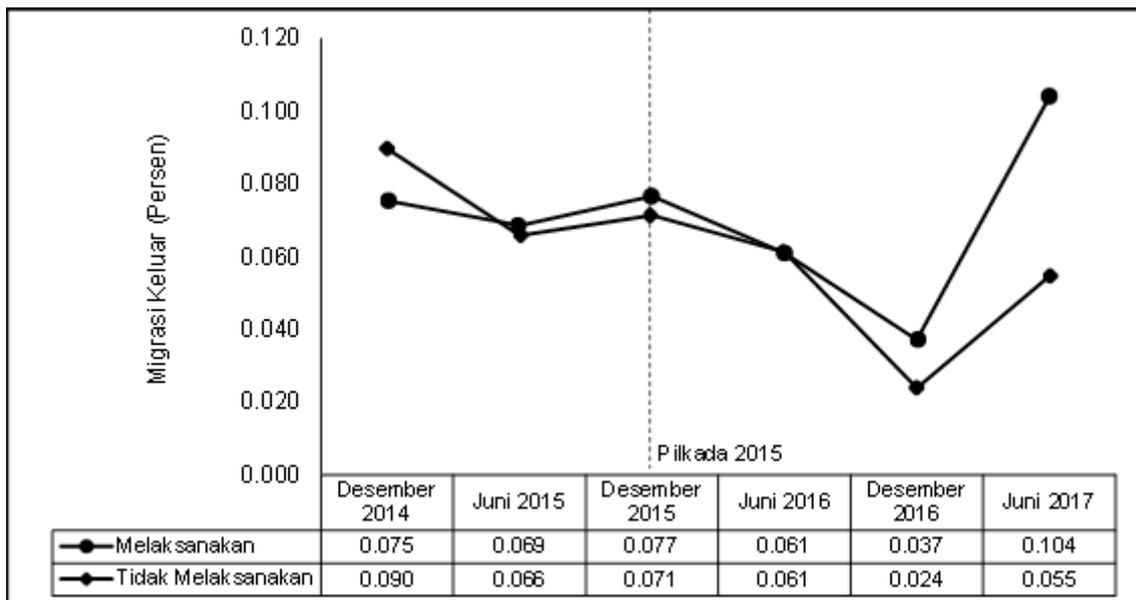
Berdasarkan data Komisi Pemilihan Umum (KPU), ada total 514 pilkada level kabupaten/kota dalam kurun waktu tahun 2014-2018. Pemilihan umum antara tahun 2014-2018 dibagi menjadi tiga periode, yaitu Desember 2015 sebanyak 260 kabupaten/kota, Februari 2017 sebanyak 100 kabupaten/kota, dan Juni 2018 sebanyak 154 kabupaten/kota. Pilkada DKI Jakarta diadakan pada level provinsi, sehingga pada penelitian ini mengasumsikan pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota yang berada di DKI Jakarta terjadi bersamaan dengan pilkada provinsi.

Penelitian ini memanfaatkan data agregat migrasi per semester tahun 2014-2018 untuk mengamati arus migrasi selama waktu sebelum dan sesudah pemilihan kepala daerah pada periode Pilkada tahun 2015, 2017, dan 2018. Data yang digunakan adalah angka resmi yang disediakan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Dirjen Dukcapil Kemendagri). Namun, penggunaan data ini memiliki beberapa kelemahan, yaitu hanya berisi informasi daerah asal individu yang melaksanakan migrasi keluar, adanya kemungkinan belum tercatat

sepenuhnya dan kemungkinan ada jeda dalam pelaporan kepindahan. Selain itu, data tersebut hanya tersedia di level kabupaten/kota sehingga memungkinkan persentase migrasi *undervalue*.

Gambar 4 menunjukkan pola migrasi keluar pada kelompok daerah yang melaksanakan pilkada di tahun 2015. Berdasarkan data migrasi Dirjen Dukcapil Kemendagri, belum terlihat pola migrasi yang berbeda antara daerah yang melaksanakan pilkada dan yang tidak melaksanakan baik saat menjelang pilkada maupun setelah dilaksanakannya pilkada tahun 2015. Namun, terlihat bahwa arus migrasi keluar pada kelompok daerah yang melaksanakan pilkada tahun 2015 lebih rendah daripada kelompok daerah yang tidak melaksanakan pilkada sebesar 0,075 persen, lebih rendah 0,015 persen.

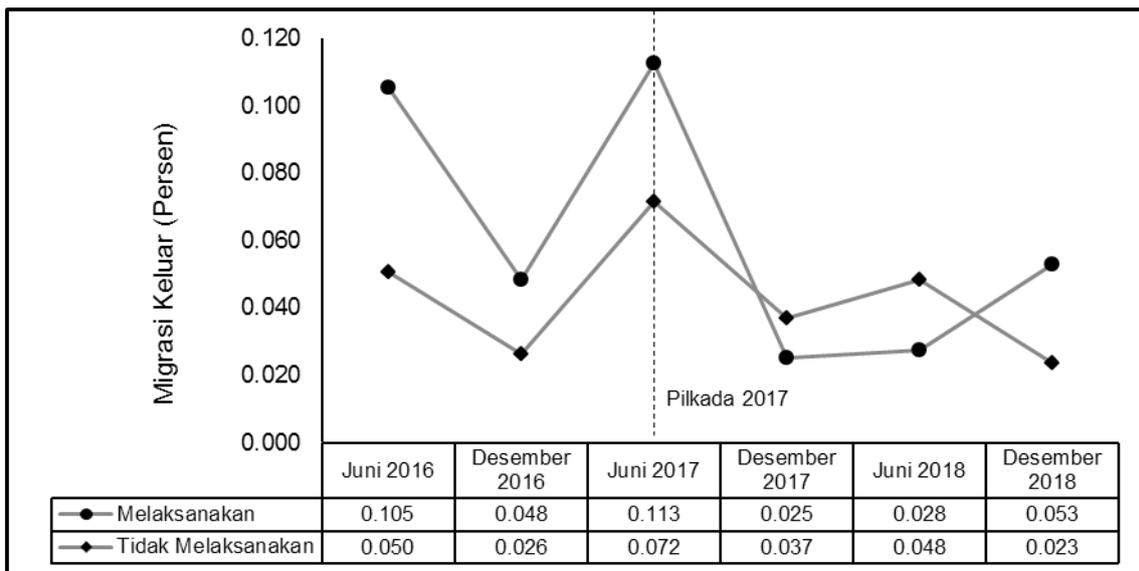
Gambar 5 menunjukkan pola migrasi keluar pada kelompok daerah yang melaksanakan pilkada di tahun 2017. Terlihat penurunan persentase penduduk yang melakukan migrasi keluar pada kelompok daerah yang melaksanakan pilkada tahun 2017 pada saat menjelang pelaksanaan pilkada sebesar 0,048 persen, lebih rendah 0,057 persen daripada arus migrasi keluar periode semester sebelumnya. Perbedaan persentase jumlah penduduk keluar terlihat kembali pada semester setelah pelaksanaan pilkada tahun 2017, yaitu pada arus migrasi keluar periode Desember 2017 dan Juni 2018. Namun, belum terlihat apakah perbedaan pola migrasi keluar ini akibat adanya pilkada karena jika dibandingkan dengan pola migrasi keluar pada daerah yang tidak melaksanakan terlihat pola yang sama dan hanya besaran persentasenya saja yang berbeda.



Keterangan: Persentase Migrasi keluar per semester antara kelompok daerah yang melaksanakan dan tidak melaksanakan pilkada tahun 2015 (Desember 2015).

Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, 2019 (diolah).

**Gambar 4.** Persentase Migrasi Keluar dan Pilkada Tahun 2015



Keterangan: Persentase Migrasi keluar per semester antara kelompok daerah yang melaksanakan dan tidak melaksanakan pilkada tahun 2017 (Februari 2017).

Pilkada tahun 2017 dilaksanakan pada bulan Februari sehingga tanda Pilkada 2017 diletakkan pada data migrasi semester 1 yaitu Juni 2017.

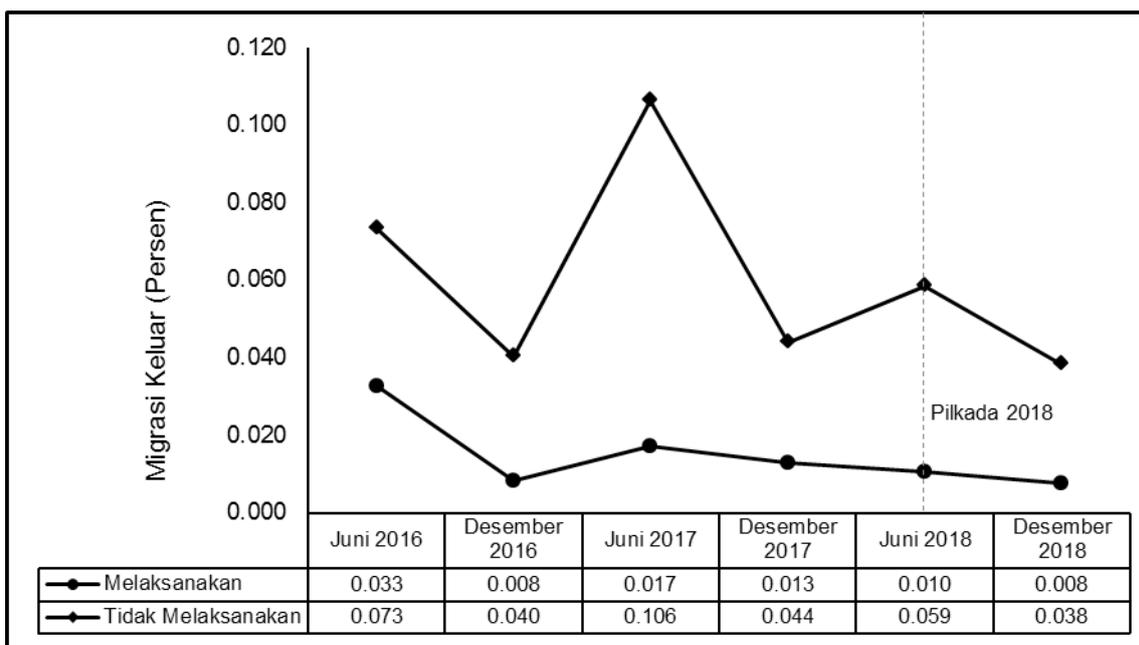
Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, 2019 (diolah).

**Gambar 5.** Persentase Migrasi Keluar dan Pilkada Tahun 2017

Gambar 6 menunjukkan pola migrasi keluar pada kelompok daerah yang melaksanakan pilkada di tahun 2018. Pola migrasi pada daerah yang melaksanakan pilkada cenderung tidak berubah, baik menjelang pilkada maupun saat pelaksanaan pilkada tahun 2018. Namun jika dibandingkan dengan kelompok daerah yang melaksanakan pilkada pada 2 periode pilkada sebelumnya, arus migrasi keluar pada kelompok daerah yang melaksanakan pilkada

di tahun 2018 cenderung lebih rendah dari kelompok daerah yang tidak melaksanakan pilkada.

Berdasarkan ketiga gambar tersebut belum terlihat pola yang berbeda pada migrasi keluar pada waktu pelaksanaan pilkada tahun 2015, 2017, dan 2018 antara daerah yang melaksanakan pilkada dan tidak melaksanakan baik saat pilkada maupun sebelum dan sesudah waktu pelaksanaan. Oleh karena itu, untuk melihat apakah ada pola migrasi



Keterangan: Persentase Migrasi keluar per semester antara kelompok daerah yang melaksanakan pilkada dan tidak melaksanakan pilkada tahun 2018 (Juni 2018).

Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, 2019 (diolah).

**Gambar 6.** Persentase Migrasi Keluar dan Pilkada Tahun 2018

yang berbeda pada saat pelaksanaan pilkada, selanjutnya penulis melakukan analisis inferensia dengan menggunakan metode *panel fixed effect*.

### Hasil Estimasi

Pada bagian ini akan dilanjutkan dengan melakukan analisis menggunakan regresi data panel dengan metode *Fixed Effect* yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan penelitian yang tidak dapat dijelaskan dengan analisis deskriptif. Model *Fixed Effect* digunakan untuk melihat korelasi waktu pelaksanaan pilkada terhadap perubahan arus migrasi keluar pada level kabupaten/kota yang dikontrol berdasarkan karakteristik demografi dan sosial-ekonomi daerah. Berdasarkan uji *chi-square* menunjukkan bahwa *prob>chi-square* bernilai 0,000; menandakan bahwa pada signifikansi  $\alpha < 1$  persen semua variabel utama secara bersama-sama berkorelasi dengan migrasi keluar.

Selanjutnya penulis melakukan uji ketahanan model (*robustness check*) untuk menunjukkan bahwa hasil estimasi yang baik, ditunjukkan dengan tingkat konsistensi yang tinggi pada model. Untuk menguji ketahanan model dilakukan dengan memasukkan variabel kontrol satu per satu. Pada Tabel 2 terlihat bahwa hasil tetap stabil dan perubahan relatif kecil saat penambahan variabel kontrol.

Berdasarkan Tabel 2, hasil estimasi menunjukkan bahwa waktu pelaksanaan pilkada secara statistik tidak signifikan berkorelasi dengan migrasi keluar pada level kabupaten/kota. Hal ini berimplikasi bahwa secara statistik tidak ada cukup bukti yang menyatakan

bahwa ada korelasi antara waktu pelaksanaan pilkada dan pola migrasi keluar suatu daerah. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan arah kebijakan yang ada pada saat pilkada terbukti tidak berpengaruh kepada keputusan migrasi secara agregat. Hasil ini sejalan dengan penelitian Revelli (2019) yang menyatakan bahwa adanya masalah informasi asimetri menimbulkan ketidakpastian terhadap hasil pilkada dan arah kebijakan baru dari calon kepala daerah sehingga tidak akan terlihat pola migrasi yang berbeda pada waktu pelaksanaan pilkada.

Di sisi lain migrasi juga dapat dilihat sebagai sebuah investasi, yang mengandung ketidakpastian. Ketidakpastian yang dimaksud adalah ketidakpastian yang muncul akibat ketidakmampuan migran dalam membandingkan kondisi daerah asal dan daerah tujuan baik sekarang maupun masa datang akibat kurangnya informasi (Burda, 1995; Revelli, 2019) *unrecoverable costs and uncertain future returns*. If migration can be postponed, the option value of doing so may have positive value. Migration may not occur for a range of individuals who would otherwise migrate on a net present value basis. This paper models the migration decision using ideas developed by Pindyck (1991). Oleh karena itu, potensial migran cenderung menunggu sebelum memutuskan untuk berpindah atau menetap.

Hasil ini berbeda dengan penelitian lain terkait migrasi dan pilkada. Penelitian Mourão et al. (2017) menyatakan bahwa adanya ekspektasi bahwa calon kepala daerah baru dapat membuat perubahan di daerah sehingga akan ada perubahan

**Tabel 2.** Hasil Estimasi Regresi *Panel Fixed Effect*

	<i>Outmigration (Persentase)</i>			
	(1)	(2)	(3)	(4)
<i>Pilkada</i>	0,008 (0,009)	0,009 (0,009)	0,009 (0,009)	0,009 (0,009)
<i>pdrbcap</i>		Yes	Yes	Yes
<i>RelativeGrowth</i>		Yes	Yes	Yes
<i>Share_agriculture</i>			YES	YES
<i>Share_manufacturing</i>			Yes	Yes
<i>Density</i>			Yes	Yes
<i>UHH</i>				Yes
<i>HLS</i>				Yes
Semester FE	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Time trend</i>	Yes	Yes	Yes	Yes
<i>Observations</i>	4626	4626	4626	4626
<i>R-square within</i>	0,007	0,010	0,017	0,021
<i>Number of groups</i>	514	514	514	514

Keterangan: *standard error robust* terkluster berdasarkan kabupaten/kota pada \*  $p < 0,10$ , \*\*  $p < 0,05$ ; \*\*\*  $p < 0,010$ .

Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan BPS, 2019 (diolah).

**Tabel 3.** Hasil Estimasi Menggunakan Variabel Independen *Lead*

	<b>lead1</b>	<b>lead2</b>	<b>lead3</b>
	(1)	(2)	(3)
<i>Outmigration</i>	-0,015*	-0,009	0,002
	(0,009)	(0,010)	(0,013)
Karakteristik Daerah*	Yes	Yes	Yes
Semester FE	Yes	Yes	Yes
<i>Time trend</i>	Yes	Yes	Yes
<i>Observations</i>	4626	4626	4626
<i>R-square within</i>	0,017	0,016	0,016
<i>Number of groups</i>	514	514	514

Keterangan: *standard error robust* terkluster berdasarkan kabupaten/kota pada \* p < 0,10; \*\* p < 0,05; \*\*\* p < 0,010; Hasil estimasi menggunakan seluruh variabel pada model (1).

Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan BPS, 2019 (diolah).

pola migrasi pada daerah yang melaksanakan pilkada. Perbedaan hasil ini diduga karena adanya perbedaan dalam kondisi sosio-ekonomi dan sistem desentralisasi, serta kondisi geografis Indonesia yang berbentuk kepulauan sehingga menaikkan biaya untuk berpindah. Hal ini menyebabkan biaya yang dikeluarkan untuk berpindah lebih besar dari insentif yang didapatkan, sehingga akan ada pola migrasi yang berbeda antara Indonesia dan negara lainnya.

Namun, penelitian Revelli (2019) juga menyatakan bahwa efek dari pelaksanaan pilkada mungkin muncul pada waktu lain yaitu waktu sebelum ataupun sesudah pelaksanaan pilkada karena adanya efek antisipasi dari pelaksanaan pilkada di daerah tersebut. Selain itu, diduga adanya efek *lag* dari respon masyarakat terhadap perubahan arah kebijakan yang ada dari pemimpin baru yang terpilih. Maka dari itu, untuk menguji apakah ada efek *lag* ataupun efek antisipasi (*lead*) dari pilkada, penulis melakukan estimasi yang hasilnya dapat dilihat pada Tabel 3 dan Tabel 4.

Berdasarkan Tabel 3 terlihat adanya efek antisipasi yaitu pada *lead1* di mana migrasi keluar

pada daerah yang melaksanakan pilkada lebih rendah 0,01 persen dibanding daerah yang tidak melaksanakan. Di Indonesia, di mana masyarakatnya pernah merasakan disparitas pembangunan yang parah, akan cenderung memiliki ekspektasi lebih kepada kepala daerah. Sehingga, jika ada kemungkinan bahwa *benefit* yang mungkin didapat saat berpindah bisa didapat dengan tetap berada di daerah asal pada saat pilkada. Hal ini akan menjadi insentif orang untuk menetap atau tidak keluar dari daerah tersebut (Guriev & Vakulenko, 2015).

Hal ini diduga mendorong potensial migran untuk *wait and see* sampai setelah pelaksanaan pilkada. Oleh karena itu, efek dari pelaksanaan pilkada muncul pada saat sebelum pelaksanaan yaitu *lead1* di mana pada saat tersebut akan ada usaha-usaha yang dilakukan oleh calon kepala daerah agar mereka terpilih sehingga menaikkan ekspektasi masyarakat akan adanya perubahan yang lebih baik di daerah tempat tinggalnya. Hal ini lah yang berkontribusi terhadap penurunan persentase migrasi keluar di daerah yang melaksanakan pilkada.

**Tabel 4.** Hasil Estimasi Menggunakan Variabel Independen *Lag*

	<b>lag1</b>	<b>lag2</b>	<b>lag3</b>
	(1)	(2)	(3)
<i>outmigration</i>	-0,013	-0,028***	0,034**
	(0,009)	(0,011)	(0,016)
Karakteristik Daerah*	Yes	Yes	Yes
Semester FE	Yes	Yes	Yes
<i>Time trend</i>	Yes	Yes	Yes
<i>Observations</i>	4626	4626	4626
<i>R-square within</i>	0,016	0,018	0,018
<i>Number of groups</i>	514	514	514

Keterangan: *standard error robust* terkluster berdasarkan kabupaten/kota pada \* p < 0,10; \*\* p < 0,05; \*\*\* p < 0,010, Hasil estimasi menggunakan seluruh variabel pada model (1).

Sumber: Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri dan BPS, 2019 (diolah).

Sedangkan pada saat setelah pelaksanaan pilkada terlihat perubahan pola migrasi keluar pada *lag2*, di mana migrasi keluar lebih rendah 0,02 persen (Tabel 4). Hasil ini mengimplikasikan bahwa efek dari pelaksanaan pilkada juga muncul pada saat sesudah pelaksanaan pilkada. Hal ini sesuai penelitian Revelli (2019) yang menyatakan bahwa respon dari masyarakat mungkin muncul tidak pada saat pelaksanaan, melainkan pada saat sebelum pelaksanaan ataupun setelah pelaksanaan pemilihan. Adanya ekspektasi dari masyarakat terhadap kepala daerah yang baru untuk melakukan perubahan di daerah melalui arah kebijakan baru, mendorong individu untuk menetap sehingga menurunkan arus migrasi keluar secara agregat.

Berdasarkan hasil estimasi pada Tabel 3 dan Tabel 4, perbedaan hasil regresi pada waktu pelaksanaan pilkada maupun sebelum dan sesudah waktu pelaksanaan mengindikasikan adanya perbedaan respon masyarakat terkait dengan arah kebijakan baru di daerah. Hal ini diduga karena adanya masalah informasi asimetri sehingga menimbulkan ketidakpastian terhadap hasil pilkada dan arah kebijakan baru dari calon kepala daerah. Kondisi ini menjadi disinsentif bagi potensial migran sehingga tidak terlihat perubahan pola migrasi keluar pada waktu pelaksanaan pilkada. Pada saat yang sama, karena keputusan migrasi didasarkan pada antisipasi dan ekspektasi terhadap kondisi daerah yang lebih baik seperti *amenities* dan penyediaan layanan dasar akan mendorong potensial migran untuk melakukan *wait and see* terhadap arah kebijakan baru kepala daerah terpilih. Hal ini diduga mendorong arus migrasi pada daerah yang melaksanakan pilkada lebih rendah daripada daerah yang tidak melaksanakan pada periode waktu menjelang pelaksanaan pilkada dan setelah pilkada tersebut dilaksanakan.

Berdasarkan hasil estimasi, efek ini diduga hanya sementara. Estimasi menggunakan variabel *lead3* menunjukkan arus migrasi keluar meningkat di daerah yang melaksanakan pilkada meningkat sebesar 0,03 persen. Hal ini mengindikasikan bahwa pengaruh pelaksanaan pilkada terhadap migrasi keluar berlaku dalam jangka pendek (*short run*).

### Diskusi

Dari hasil penelitian ini, perbedaan korelasi pelaksanaan pilkada terhadap pola migrasi yang ada di Indonesia dengan hasil negara lain, setidaknya terdapat tiga alasan. *Pertama*, mengasumsikan individu bebas berpindah dari satu daerah ke daerah lain, yang artinya dapat secara spontan memutuskan pindah. Pada kasus Indonesia, walaupun tidak ada halangan untuk masuk ke daerah lain, *amenities* seperti fasilitas jalan ataupun fasilitas transportasi

belum merata, sehingga dapat meningkatkan biaya untuk berpindah menjadi lebih tinggi untuk daerah yang kurang berkembang. Hal tersebut menjadi salah satu faktor penghambat untuk melakukan perpindahan (Liu & Shen, 2014; Wajdi et al., 2017). Namun, hal ini tidak berlaku untuk potensial migran yang berasal di daerah yang relatif lebih berkembang atau perkotaan. Motivasi mereka dalam menentukan untuk berpindah atau tidak karena adanya tekanan penduduk (Yudhistira et al., 2019).

*Kedua*, informasi tentang penyediaan barang publik dan pengeluaran pemerintah dianggap tetap dan diketahui penuh oleh masyarakat. Sedangkan pada kondisi Indonesia ada informasi asimetrik. Masyarakat tidak memiliki informasi penuh tentang barang dan layanan publik serta *amenities* yang disediakan pemerintah (Revelli, 2019; Schettini & Terra, 2020; Tiwari, 2017). Oleh karena itu, adanya informasi asimetrik menjadi disinsentif untuk potensial migran.

*Ketiga*, Indonesia sebagai negara demokrasi muda belum memiliki kesadaran baik dari sisi masyarakat sebagai pemilih kepala daerah maupun dari sisi calon kepala daerah dan pemerintahnya. Hal ini menjadikan kebijakan yang dihasilkan oleh kepala daerah yang baru belum menjadi insentif yang cukup untuk merubah perilaku migrasi masyarakat (Dubois, 2016; Revelli, 2019; Schettini & Terra, 2020; Tiwari, 2017).

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, mendorong potensial migran pada daerah yang melaksanakan pilkada memilih menunggu (*wait and see*) sampai pelaksanaan pilkada selesai karena ada informasi asimetrik. Namun, jika masalah informasi asimetrik selesai, potensial migran akan tetap bermigrasi jika arah kebijakan baru dari kepala daerah baru yang terpilih tidak sesuai dengan preferensi mereka, atau ketika insentif yang didapat dari berpindah ke daerah lain lebih tinggi.

### KESIMPULAN

Perbedaan pola migrasi antardaerah menunjukkan adanya kesenjangan pembangunan, salah satunya dari sisi fasilitas serta penyediaan barang dan layanan publik. Hal ini merupakan salah satu faktor yang mendorong orang untuk melakukan migrasi. Desentralisasi merupakan salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk mengurangi kesenjangan dan mempercepat proses pemerataan pembangunan daerah, di antaranya melalui pilkada. Kepala daerah terpilih diharapkan dapat menghasilkan kebijakan sesuai dengan kebutuhan dan preferensi masyarakatnya. Pada saat pelaksanaan pilkada akan ada perubahan arah kebijakan terkait fasilitas dan penyediaan barang publik dari pemerintah daerah. Hal ini akan memengaruhi pola migrasi yang berbeda.

Penelitian ini bertujuan untuk melihat hubungan waktu pelaksanaan pilkada terhadap perubahan pola migrasi keluar di level kabupaten/kota. Hasil deskriptif menunjukkan tidak terdapat perbedaan pola migrasi pada daerah yang melaksanakan pilkada baik saat sebelum pelaksanaan maupun setelah pelaksanaan pilkada. Namun, terlihat perbedaan besaran arus migrasi keluar pada kelompok daerah yang melaksanakan pilkada yang cenderung lebih rendah dari kelompok daerah yang tidak melaksanakan pilkada pada periode waktu menjelang pilkada dan setelah pilkada tersebut dilaksanakan.

Sejalan dengan hasil deskriptif, hasil estimasi menunjukkan bahwa tidak ada cukup bukti yang menyatakan bahwa ada pola migrasi yang berbeda pada saat pelaksanaan pilkada. Perbedaan pola migrasi keluar terlihat pada saat menjelang pelaksanaan dan setelah pelaksanaan pilkada. Hal ini berimplikasi bahwa hubungan pilkada terhadap pola migrasi adalah sebagai faktor penahan sehingga pada saat menjelang pelaksanaan pilkada akan menahan orang untuk bermigrasi keluar dari daerah tersebut. Hasil ini mengindikasikan bahwa ekspektasi masyarakat terhadap arah kebijakan baru di daerah dapat menjadi insentif untuk menetap atau menunda waktu bermigrasi bagi potensial migran, sehingga menurunkan arus migrasi keluar, setidaknya pada *short run*.

Berdasarkan hasil, penelitian ini terbatas pada mobilitas penduduk pada level agregat kabupaten/kota yang direpresentasikan dengan arus migrasi keluar. Karena keterbatasan data yang ada, penelitian ini hanya mencakup faktor penarik dan pendorong migrasi level agregat dan belum dapat menjawab motivasi perpindahan penduduk di level individu maupun faktor lain yang dapat memengaruhi potensial migran seperti adanya inkumben atau usaha-usaha yang dilakukan calon kepala daerah selama periode menjelang pemilihan. Hal tersebut dapat dikembangkan menjadi topik penelitian selanjutnya.

#### UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis sangat menghargai dukungan Dr. Vid Adrison sebagai pembimbing dan Pusbindiklatren Bappenas yang memberikan beasiswa di Program Magister Perencanaan Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. Terima kasih khususnya kepada Indra Degree Karimah dan Resa Surya Utama untuk dukungan mereka dalam pengumpulan data dan analisis ekonometrik serta untuk semua anggota PB39 MPKP-FEBUI untuk dukungan dan diskusi yang berharga.

#### DAFTAR PUSTAKA

##### Buku

BPS. (2011). *Migrasi Internal Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Wooldridge, J. M. (2013). *Introductory econometrics: a modern approach*. 5th ed. Mason, OH: South-Western Cengage Learning.

##### Jurnal dan Working Paper

Alam, Pervez & Ahmade, K. (2013). Impact of Solid Waste on Health and The Environment. *Special Issue of International Journal Of Sustainable Development and Green Economics*, 2, 165–168. Retrieved from [https://www.researchgate.net/publication/306150450\\_Impact\\_of\\_Solid\\_Waste\\_on\\_Health\\_and\\_The\\_Environment](https://www.researchgate.net/publication/306150450_Impact_of_Solid_Waste_on_Health_and_The_Environment)

Alatas, S. (1993). Macro patterns of internal migration in Indonesia, 1971-1990. *Majalah Demografi Indonesia*, 20(40), 21–47.

Antony, G. M., & Visweswara Rao, K. (2007). A composite index to explain variations in poverty, health, nutritional status and standard of living: Use of multivariate statistical methods. *Public Health*, 121, 578–587. <https://doi.org/10.1016/j.puhe.2006.10.018>

Basker, E. (2018). Education, job search, and migration. *Journal of Regional Analysis and Policy*, 48(4), 38–61. <https://doi.org/10.2139/ssrn.371120>

BPS. (2011). *Migrasi Internal Penduduk Indonesia*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Bryan, G., & Morten, M. (2019). The aggregate productivity effects of internal migration: Evidence from Indonesia. *Journal of Political Economy*, 127(5), 2229–2268. <https://doi.org/10.1086/701810>

Burda, M. C. (1995). Migration and the option value of waiting. *Economic and Social Review*, 27(1), 1–19.

Cherchye, L., Ooghe, E., & Van Puyenbroeck, T. (2008). Robust human development rankings. *Journal of Economic Inequality*, 6, 287–321. <https://doi.org/10.1007/s10888-007-9058-8>

Dubois, E. (2016). Political business cycles 40 years after Nordhaus. *Public Choice*, 166(1–2), 235–259. <https://doi.org/10.1007/s1127-016-0313-z>

- Eren, M., Çelik, A. K., & Kubat, A. (2014). Determinants of the levels of development based on the human development index: A comparison of regression models for limited dependent variables. *Review of European Studies*, 6(1), 10–22. <https://doi.org/10.5539/res.v6n1p10>
- Faguet, J. P. (2014). Decentralization and Governance. *World Development*, 53(C), 2–13. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.01.002>
- Fratesi, U., & Percoco, M. (2014). Selective Migration, Regional Growth and Convergence: Evidence from Italy. *Regional Studies*, 48(10), 1650–1668. <https://doi.org/10.1080/00343404.2013.843162>
- Guriev, S., & Vakulenko, E. (2015). Breaking out of poverty traps: Internal migration and interregional convergence in Russia. *Journal of Comparative Economics*, 43(3), 633–649. <https://doi.org/10.1016/j.jce.2015.02.002>
- Hao, L., Houser, D., Mao, L., & Villeval, M. C. (2016). Migrations, risks, and uncertainty: A field experiment in China. *Journal of Economic Behavior and Organization*, 131, 126–140. <https://doi.org/10.1016/j.jebo.2016.08.008>
- Harris, J. R., & Todaro, M. P. (1970). Migration, Unemployment and Development: A Two-Sector Analysis. *American Economic Review*, 60(1), 126–142.
- Hugo, G. J. (1982). Circular Migration in Indonesia. *Population and Development Review*, 8(1), 59–83. <https://doi.org/10.2307/1972690>
- Karimah, I. D., & Yudhistira, M. H. (2020). Does small-scale port investment affect local economic activity? Evidence from small-port development in Indonesia. *Economics of Transportation*, 23, 100180. <https://doi.org/10.1016/j.ecotra.2020.100180>
- Kuznets, S. (1973). Modern Economic Growth: Findings and Reflections. *American Economic Review*, 63(3), 247–258.
- Lee, E. S. (1966). A Theory of Migration. *Demography*, 3(1), 47–57.
- Lee, H. S., Lin, K., & Fang, H. H. (2006). A fuzzy multiple objective DEA for the human development index. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 922–928. [https://doi.org/10.1007/11893004\\_118](https://doi.org/10.1007/11893004_118)
- Lewis, W. A. (1954). Economic Development with Unlimited Supplies of Labour. *The Manchester School*, 22(2), 139–191. <https://doi.org/10.1111/j.1467-9957.1954.tb00021.x>
- Liu, Y., & Yamauchi, F. (2014). Population density, migration, and the returns to human capital and land: Insights from Indonesia. *Food Policy*, 48, 182–193. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2014.05.003>
- Liu, Y., & Shen, J. (2014). Spatial patterns and determinants of skilled internal migration in China, 2000–2005. *Papers in Regional Science*, 93(4), 749–771. <https://doi.org/10.1111/pirs.12014>
- Mitze, T., & Schmidt, T. D. (2015). Internal migration, regional labor markets and the role of agglomeration economies. *Annals of Regional Science*, 55, 61–101. <https://doi.org/10.1007/s00168-015-0683-z>
- Mourão, P. R., Ercolano, S., & Gaeta, G. L. (2017). Are there electoral cycles of emigration? An empirical investigation based on European data. *International Migration*, 56(3), 5–27. <https://doi.org/10.1111/imig.12421>
- Otto, A. H., & Steinhardt, M. F. (2014). Immigration and election outcomes - Evidence from city districts in Hamburg. *Regional Science and Urban Economics*, 45, 67–79. <https://doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2014.01.004>
- Prima, I.T., & Khoirunurrofik, K. (2019). Economic Inequality, Regional Development, and Internal Migration in Indonesia. *Economics and Finance in Indonesia*, 65(1), 53–66.
- Ranis, G., & Fei, J. C. H. (1961). A Theory of Economic Development. *The American Economic Review*, 51(4), 533–565.
- Revelli, F. (2019). The electoral migration cycle. *European Journal of Political Economy*, 59(September 2019), 461–482. <https://doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2019.05.007>
- Schettini, B. P., & Terra, R. (2020). Electoral incentives and Public Employees' Retirement Systems in Brazilian municipalities. *Public Choice*, 184(1–2), 79–103. <https://doi.org/10.1007/s11127-019-00701-8>
- Sjahir, B. S., Kis-Katos, K., & Schulze, G. G. (2013). Political budget cycles in Indonesia at the district level. *Economics Letters*, 120(2), 342–345. <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2013.05.007>

- Stark, O. (1984). Discontinuity and the Theory of International Migration. *Kyklos*, 37(2), 206–222. <https://doi.org/10.1111/j.1467-6435.1984.tb00749.x>
- Stark, O., Helmenstein, C., & Prskawetz, A. (1997). A brain gain with a brain drain. *Economics Letters*, 55(2), 227–234. [https://doi.org/10.1016/S0165-1765\(97\)00085-2](https://doi.org/10.1016/S0165-1765(97)00085-2)
- Tiebout, C. M. (1956). A Pure Theory of Local Expenditures. *Journal of Political Economy*, 64(5), 416–424. <https://doi.org/10.1086/257839>
- Tiwari, S. (2017). Does Local Development Influence Outmigration Decisions? Evidence from Indonesia. *World Development*, 93, 108–124. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2016.12.028>
- Todaro, M. P. (1969). A Model of Labor Migration and Urban Unemployment in Less Developed Countries. *The American Economic Review*, 59(1), 138–148. <https://doi.org/10.2307/1811100>
- Todaro, M. P. (1976). Migration and economic development: a review of theory, evidence, methodology and research priorities. In *Occasional Paper 18*. Nairobi: Institute for Development Studies, University of Nairobi.
- Tullock, G. (1971). Public Decisions as Public Goods. *Journal of Political Economy*, 79(4), 913–918.
- UNDP. (2019). Inequalities in Human Development in the 21st Century: Indonesia. In *Human Development Report 2019*. New York.
- van Lottum, J., & Marks, D. (2012). The determinants of internal migration in a developing country: Quantitative evidence for Indonesia, 1930-2000. *Applied Economics*, 44(34), 4485–4494. <https://doi.org/10.1080/00036846.2011.591735>
- Wajdi, N., Van Wissen, L. J., & Mulder, C. H. (2015). Interregional migration flows in Indonesia. *Sojourn: Journal of Social Issues in Southeast Asia*, 30(2), 371–422.
- Wajdi, N., Adioetomo, S. M., & Mulder, C. H. (2017). Gravity models of interregional migration in Indonesia. *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 53(3), 309–322. <https://doi.org/10.1080/00074918.2017.1298719>
- Wajdi, N., Mulder, C. H., & Adioetomo, S. M. (2017). Inter-regional migration in Indonesia: a micro approach. *Journal of Population Research*, 34, 253–277. <https://doi.org/10.1007/s12546-017-9191-6>
- Waldorf, B., & Seong, D. Y. (2016). Labor Migration and Overeducation Among Young College Graduation. *Review of Regional Research*, 36(2), 99–119.
- Wooldridge, J. M. (2013). Introductory econometrics : a modern approach / Jeffrey M. Wooldridge. In *Introductory econometrics : a modern approach*.
- Yudhistira, M. H., Indriyani, W., Pratama, A. P., Sofiyandi, Y., & Kurniawan, Y. R. (2019). Transportation network and changes in urban structure: Evidence from the Jakarta Metropolitan Area. *Research in Transportation Economics*, 74, 52–63. <https://doi.org/10.1016/j.retrec.2018.12.003>

#### Laporan

- UNDP. (2019). Inequalities in human development in the 21st century: Indonesia. *Human Development Report 2019*. New York.

#### Conference Paper

- Lee, H.S., Lin, K., & Fang, H.H. (2006). A fuzzy multiple objective DEA for the human development index. *Lecture Notes in Computer Science (Including Subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*, 922-928.

**Lampiran 1. Persentase Rata-rata Net Migrasi**

Net Migrasi Rata-rata	Tidak Melaksanakan		Melaksanakan	
	Non-Jawa	Jawa	Non-Jawa	Jawa
Pilkada 2015				
t-1	-0.80	0.15	0.25	0.30
t	-0.76	0.22	0.45	0.54
t+1	-0.95	0.80	-0.07	0.79
Pilkada 2017				
t-1	-0.13	0.41	0.81	1.92
t	-0.15	0.45	0.52	1.60
t+1	0.57	0.49	0.78	1.35
Pilkada 2018				
t-1	0.41	0.39	1.16	0.95
t	0.43	0.36	1.69	0.39
t+1	1.37	0.19	0.64	0.83

Sumber: Dirjen Dukcapil Kemendagri, diolah (2019).

**Lampiran 2. Tabulasi Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Pilkada pada Tahun 2014-2018**

	Pilkada		Jumlah
	Tidak Melaksanakan	Melaksanakan	
201402	514	0	514
201501	514	0	514
201502	254	260	514
201601	514	0	514
201602	514	0	514
201701	414	100	514
201702	514	0	514
201801	360	154	514
201802	514	0	514
Jumlah	4112	514	4626

Sumber: Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, 2019 (diolah).

Catatan: Pilkada DKI Jakarta diadakan pada level provinsi, sehingga diasumsikan pelaksanaan pilkada di kabupaten/kota yang berada di DKI Jakarta terjadi bersamaan dengan pilkada provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan pada Tahun 2017.

## Lampiran 3. Summary Variable

```
. xtsum outmigration directelection pdrbkap relativegrowth share_agriculture share_manufacturing density2 hls uhh
```

Variable	Mean	Std. Dev.	Min	Max	Observations
outmig~n overall	.0558865	.2578364	0	3.792625	N = 4626
between	.1766116	.0007156	1.646704		n = 514
within	.1879944	-1.586652	2.770125		T = 9
direct~n overall	.1111111	.3143037	0	1	N = 4626
between	0	.1111111	.1111111		n = 514
within	.3143037	0	1		T = 9
pdrbkap overall	.4686092	.5568847	.0487	6.92243	N = 4626
between	.5526449	.0557711	5.933308		n = 514
within	.0723354	-.7492886	1.457731		T = 9
relati~h overall	.4820579	.499732	0	1	N = 4626
between	.3951155	0	1		n = 514
within	.306408	-.406831	1.370947		T = 9
share~re overall	25.7734	15.51032	0	77.77	N = 4626
between	15.44565	.0085556	76.83889		n = 514
within	1.553865	4.41053	38.42196		T = 9
sha~ring overall	12.46319	14.02211	0	85.55	N = 4626
between	13.99236	0	84.07667		n = 514
within	1.082612	-13.39674	30.46527		T = 9
density2 overall	1.079913	2.588428	.0011923	23.80156	N = 4626
between	2.589886	.0012472	23.5428		n = 514
within	.0636449	.3838004	2.308018		T = 9
hls overall	12.58671	1.415742	2.16	17.26	N = 4626
between	1.395852	2.484444	17.01778		n = 514
within	.2435013	11.53337	13.3356		T = 9
uhh overall	68.86058	3.630988	53.6	77.54	N = 4626
between	3.627706	54.29333	77.48333		n = 514
within	.2158456	67.54058	69.73947		T = 9

Lampiran 4. Hasil Estimasi Fixed Effect dengan Mengontrol *Time Trend* dan Semester FE dengan *Cluster Robust Standard Error* Berdasarkan Kabupaten/Kota Menggunakan Stata 15.1

```
. xtreg outmigration directelection pdrbkap relativegrowth share_agriculture share_manufacturing density2 hls uhh
> i.semester t, fe cluster(id)
```

```
Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =    4,626
Group variable: id                    Number of groups =    514
```

```
R-sq:                                Obs per group:
    within = 0.0167                    min =          9
    between = 0.0447                    avg =         9.0
    overall = 0.0230                    max =          9
```

```
corr(u_i, Xb) = -0.8377                F(10,513)      =    2.90
                                          Prob > F        =    0.0016
```

(Std. Err. adjusted for 514 clusters in id)

outmigration	Coef.	Robust Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
directelection	.0089558	.0085942	1.04	0.298	-.0079284	.0258399
pdrbkap	-.0028293	.0310584	-0.09	0.927	-.0638466	.0581881
relativegrowth	-.0137945	.0102405	-1.35	0.179	-.0339129	.0063239
share_agriculture	-.0088191	.0073504	-1.20	0.231	-.0232596	.0056215
share_manufacturing	-.0046889	.0054625	-0.86	0.391	-.0154205	.0060427
density2	.0526801	.0227101	2.32	0.021	.0080639	.0972964
hls	-.0495046	.0283176	-1.75	0.081	-.1051373	.0061282
uhh	-.0795594	.0337144	-2.36	0.019	-.1457947	-.0133242
2.semester	-.0214147	.0075631	-2.83	0.005	-.0362733	-.0065562
t	.0011494	.0033315	0.35	0.730	-.0053957	.0076945
_cons	6.398322	2.491826	2.57	0.011	1.502884	11.29376
sigma_u	.31846813					
sigma_e	.1979503					
rho	.72131882	(fraction of variance due to u_i)				

### Lampiran 5. Hasil Estimasi *Fixed Effect* dengan Menggunakan Stata 15.1

```
. xtreg outmigration directelection pdrbkap relativegrowth share_agriculture share_manufacturing density2 hls uhh,
> fe cluster(id)
```

```
Fixed-effects (within) regression      Number of obs   =      4,626
Group variable: id                    Number of groups =      514

R-sq:                                  Obs per group:
    within = 0.0138                     min       =      9
    between = 0.0388                    avg       =     9.0
    overall = 0.0200                    max       =      9

                                F(8,513)        =      3.22
corr(u_i, Xb) = -0.7985                Prob > F       =     0.0014
```

(Std. Err. adjusted for 514 clusters in id)

outmigration	Robust					
	Coef.	Std. Err.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
directelection	.0100186	.008658	1.16	0.248	-.0069909 .0270282	
pdrbkap	.006221	.0328065	0.19	0.850	-.0582307 .0706727	
relativegrowth	-.0140914	.0100222	-1.41	0.160	-.0333781 .0055981	
share_agriculture	-.0088166	.007438	-1.19	0.236	-.0234293 .0057962	
share_manufacturing	-.0047025	.0054697	-0.86	0.390	-.0154483 .0060434	
density2	.0481506	.0190718	2.52	0.012	.0106821 .0856191	
hls	-.0405148	.0243387	-1.66	0.097	-.0883304 .0073009	
uhh	-.0673501	.0228119	-2.95	0.003	-.1121664 -.0225337	
_cons	5.440204	1.593704	3.41	0.001	2.309215 8.571192	
sigma_u	.28941214					
sigma_e	.19818632					
rho	.6807647	(fraction of variance due to u_i)				

### Lampiran 6. Hasil Uji Multikolinieritas

```
. corr directelection pdrbkap relativegrowth share_agriculture share_manufacturing density2 hls uhh
(obs=4,626)
```

	direct-n	pdrbkap	relati-h	share-re	sha-ring	density2	hls	uhh
directelec-n	1.0000							
pdrbkap	0.0026	1.0000						
relativegr-h	-0.0024	-0.0195	1.0000					
share_agri-e	0.0002	-0.3837	-0.1518	1.0000				
share_manu-g	0.0008	0.2736	-0.0698	-0.3752	1.0000			
density2	0.0005	0.3370	0.1559	-0.5040	0.1798	1.0000		
hls	0.0006	0.1139	0.0473	-0.2652	0.0787	0.2785	1.0000	
uhh	0.0014	0.1805	0.0451	-0.4367	0.3931	0.3999	0.3924	1.0000